

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hampir setiap negara di dunia pasti memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Seperti yang tertuang dalam kamus W.J.S Poerwadarminta (1990), sejahtera diartikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Dengan artian bahwa kesejahteraan masyarakat meliputi keamanan, keselamatan, serta kemakmuran.

Namun pada kenyataannya di beberapa negara masih muncul permasalahan yang menghambat terciptanya kesejahteraan, salah satunya yaitu di Indonesia. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial masih belum terselesaikan dari dulu hingga sekarang. Bahkan terjadi kecenderungan yang mengakibatkan menurunnya standar kehidupan masyarakat karena adanya perubahan sosial yang beriringan dengan proses peralihan yang semula masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Disisi lain, masalah-masalah sosial konvensional seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan masih belum tertangani (Suryono, 2014). Hal tersebut menimbulkan pemikiran bahwa masih diperlukan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif. Kebijakan tersebut harus bersifat terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa melihat status sosial ekonomi, agama, ras, suku bangsa, usia, dan jenis kelamin. Sehingga semua masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Sebenarnya sudah ada kebijakan yang mengatur tentang kemiskinan yang tertera pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara,” yang artinya secara tidak langsung bahwa semua orang miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Akan tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi hingga saat ini.

Faktor lain yang memicu rendahnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu masalah pengangguran. Pengangguran yang terjadi di Indonesia terjadi karena ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja (Soleh, 2017). Selain kelebihan tenaga kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi alasan terjadinya pengangguran. Pasalnya lapangan pekerjaan yang tersedia hanya dapat diisi oleh beberapa orang saja. Oleh karena itu, memiliki pekerjaan yang layak masih belum dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi semenjak masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Alih-alih mencegah penyebaran penyakit, kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak yang besar pada sektor perekonomian. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian harus melakukan tindakan seperti pengurangan upah kerja bahkan hingga pemutusan hubungan

kerja (PHK) terhadap karyawannya. Pemutusan Hubungan Kerja hampir dilakukan oleh banyak perusahaan baik perusahaan skala kecil maupun besar. Kejadian tersebutlah yang kemudian meningkatkan angka pengangguran yang cukup signifikan dan menyebabkan masyarakat mengalami kemiskinan transien dalam waktu tertentu. Kemiskinan transien sendiri adalah situasi di mana kehidupan seseorang atau sekelompok keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji-Indra dalam Pratama, 2014)

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 1,84 persen per Agustus 2020. Di Kota Semarang sendiri tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 4,54 persen menjadi 9,57 persen di tahun 2020.

Dalam upayanya menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi, pemerintah memberikan respon terhadap keluhan masyarakat dengan memberikan berbagai macam bantuan yang dapat dirasakan selama pandemi ini berlangsung. Salah satunya yaitu dengan peluncuran program Kartu Prakerja yang merupakan program yang diunggulkan pada era pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024 (Maftuchan, 2020). Melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, program ini akhirnya resmi diluncurkan pada 11 April 2020. Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, atau pekerja yang memerlukan kompetensi tambahan. Kebijakan kartu prakerja juga sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dengan

pihak swasta yang telah disiapkan sehingga dapat memberikan nilai baik kepada penerima manfaat maupun terhadap sektor swasta.

Menurut Pratiwi (dalam Predianto, 2020) pada program Kartu Prakerja, masyarakat mendapatkan dua hak yakni pelatihan online yang dapat diakses untuk meningkatkan kapabilitas diri yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing, serta bantuan dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Pelatihan sendiri merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan terhadap tenaga kerja yang dijalankan oleh tenaga profesional kepelatihan pada satuan waktu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas (Hamalik dalam Nadeak, 2019).

Apabila dilihat secara teknis, prosedur yang dilakukan mulai dari pendaftaran hingga dilakukannya pelatihan tergolong mudah karena dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dimana saja. Namun, bagi sebagian orang menganggap prosedur yang dilakukan berbelit-belit terutama bagi sektor informal yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathin dkk, salah seorang pekerja informal kesulitan dalam mengakses program Kartu Prakerja karena dianggap kurang melek terhadap dunia teknologi digital. Pada kenyataannya, diluar sana memang masih banyak masyarakat yang memiliki antusias yang besar untuk mengikut program Kartu Prakerja, namun karena terhambat oleh keterbatasan teknologi masyarakat menjadi tidak bisa mengakses program tersebut. Bahkan

tak jarang masyarakat awam yang kurang mengetahui berlangsungnya program ini.

Bukan hanya itu, masyarakat yang telah mendaftar Kartu Prakerja pun mengeluhkan ketidaklolosannya yang terjadi berulang kali padahal syarat yang diperlukan sudah dipenuhi. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya alur seleksi yang dilakukan dalam program tersebut.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kota Semarang.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yakni:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam program Kartu Prakerja di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kartu Prakerja di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam program Kartu Prakerja di Kota Semarang.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implemenetasi kebijakan pemerintah dalam program Kartu Prakerja di Kota Semarang

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam studi ilmu pemerintahan yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah khususnya program kartu prakerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dinas-dinas terkait pelaksanaan program kartu prakerja.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program kartu prakerja.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan sebagai referensi guna memperkaya teori pada penelitian ini. Penelitian terdahulu juga memiliki maksud untuk menghindari kesamaan judul

maupun isi dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Hasil Penelitian Miftah Hakim Fadholah (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Hakim Fadholah memiliki judul "*Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dan kuesioner. Dalam skripsi tersebut, penulis menganalisis potensi mal administrasi yang terjadi saat program Kartu Prakerja diluncurkan, mulai dari tindakan sewenang-wenang, konflik kepentingan, dan tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Hasil Penelitian Yoshua Consuello (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Yoshua Consuello memiliki judul "*Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan studi literature. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis keefektifan kebijakan Kartu Prakerja yang dijalankan pada saat pandemi. Berdasarkan penelitian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yakni kebijakan Kartu Prakerja tidak akan sepenuhnya efektif untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran yang melonjak karena dampak pandemi apabila tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan.

Peneliti menganggap bahwa bantuan tunai langsung lebih dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

3. Hasil Penelitian Tomi Predianto dan Khoirurrosyidin (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Tomi Predianto dan Khoirurrosyidin memiliki judul "*Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19*". Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji sejauh mana efektivitas program Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa program Kartu Prakerja masih memiliki kekurangan terutama dalam hal kuota yang tidak seimbang dengan antusiasme masyarakat. Selain itu, program ini kurang fokus untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu baik dalam hal pendidikan, finansial, bahkan yang terdampak Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena sistem seleksi yang acak sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga bersaing dengan peserta lain yang mungkin dalam keadaan yang berkecukupan.

4. Hasil Penelitian Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, dan Fahmi Ardianto (2021)

Penelitian dengan judul "*Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas*" dilakukan menggunakan metode penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Pada penelitian

tersebut mengangkat permasalahan mengenai manfaat dan aksesibilitas program Kartu Prakerja yang kurang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sampang. Beberapa kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam tulisannya yaitu, masih terbatasnya akses internet sehingga menyebabkan sinyal tidak stabil saat mengakses website Kartu Prakerja. Selain itu kegiatan pelatihan yang hanya diberikan melalui tayangan video tanpa dibarengi praktik secara langsung membuat program ini kurang efektif bagi masyarakat. Sejauh ini, Kartu prakerja memang memiliki manfaat yang baik untuk membantu masyarakat meningkatkan soft skill namun perlunya evaluasi dari pemerintah mengingat Kartu Prakerja memiliki peminat yang cukup tinggi.

5. Hasil Penelitian Siti Dwi Yana (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Dwi Yana memiliki judul *“Efektifitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusia di Tengah Pandemi”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif yang datanya bersumber dari wawancara kepada masyarakat penerima bantuan Kartu Prakerja di desa Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa program Kartu Prakerja kurang efektif pada saat pandemi karena masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung tunai untuk menopang biaya hidup mereka. Namun disisi lain, program ini juga membantu masyarakat

sebagai modal untuk memperoleh pekerjaan dengan melampirkan sertifikat yang didapat selama pelatihan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat kita lihat bahwa penelitian sebelumnya memiliki tujuan yang sama dengan penelitian saat ini yaitu untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai bentuk bantuan dari pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah penulis menitikberatkan pada implementasi program Kartu Prakerja pada masyarakat di Kota Semarang.

1.5.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan peraturan perundangan yang dipakai untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat oleh negara khususnya pemerintah dalam mencapai tujuan negara.

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam Tahir, 2014) mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah. Kemudian Anderson juga mengklasifikasi kebijakan kedalam dua jenis: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan serta pejabat-pejabat pemerintah.

Carl I Friedrich (dalam Riant, 2014) dalam Indiahono mengatakan bahwa istilah dari kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever goverment choose to do or no to do*”, yang memiliki arti bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Islamy (dalam Ismail) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (public policy), antara lain:

- a. Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan namun juga dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu butuh dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus diperuntukan pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dibuat

dalam rangka mencapai tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

1.5.3. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi dipandang secara luas mempunyai arti pelaksanaan kebijakan di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam rangka untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program yang diinginkan. (Kasmad, 2018).

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005) keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

- a. Communication/komunikasi. Salah satu syarat untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa implementor mengetahui hal-hal yang harus dilakukan, yang mengartikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran agar dapat menghindari terjadinya distorsi implementasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi antara lain yaitu transmission/cara menyampaikan informasi, clarity/kejelasan informasi, serta consistency/konsistensi dalam penyampaian informasi.
- b. Resources/sumberdaya, selain pentingnya mengkomunikasikan kebijakan secara jelas dan konsisten, mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan juga memerlukan sumber daya yang

memadai. Apabila terjadi kekurangan sumberdaya, maka implementasi akan berjalan tidak efektif. Sumberdaya yang dimaksud tersebut bisa berbentuk sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Dispositions or attitude/disposisi, merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, maupun sifat demokratis. Implementor yang memiliki disposisi yang baik biasanya dapat menjalankan kebijakan sesuai apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, implementor yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan, maka akan menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
- d. Bureaucratic structure/struktur birokrasi. Struktur organisasi yang memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) yang menjadi pedoman implementor dalam bertindak. Selain SOP, aspek penting lainnya yaitu fragmentasi yang berarti pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban.

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan (*to carry out*), menepati janji sebagaimana tertuang dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), menghasilkan hasil sebagaimana yang tertuang dalam tujuan

kebijakan (*to produce*) dan memenuhi misi yang akan dilakukan sebagaimana tercantum dalam tujuan kebijakan (*to complete*)

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumberdaya. Untuk menjalankan program, pelaksana harus terkait dengan tugas, lingkungan, klien, dan grup terkait.

Hill and Hupe (dalam Handoyo, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu pembuat keputusan dan pihak implementator. Grindle (dalam Winarno 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Sedangkan menurut Van Meter dan van Horn (dalam Winarno 2007) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Dari beberapa definisi implementasi kebijakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kegiatan implementasi kebijakan mencakup dua aktor

penting yaitu pembuat kebijakan yang biasa disebut formulator, dan pelaksana implementasi atau disebut implementator.

1.5.4. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu model pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

Spicker (dalam Sukmana, 2016) berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Spicker juga menjelaskan bahwa terdapat setidaknya lima bidang utama untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Adapula definisi konsep negara kesejahteraan menurut Husodo yakni ia menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Triwibowo & Bahagijo, 2006). Sementara konsep negara kesejahteraan menurut Esping-Anderson (Triwibowo & Bahagijo, 2006) yaitu negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup

tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.

Berdasarkan beberapa definisi konsep negara kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep negara kesejahteraan mengacu pada penyediaan pelayanan sosial yang ditujukan oleh penduduk di negara tersebut yang disisi lain berarti bahwa suatu negara bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

1.6. Operasional Konsep

1.6.1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui serangkaian program-program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai pilar pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan terus mengkaji terhadap kebijakan publik yang akan diterapkan, dilihat dari seberapa urgensi suatu masalah di dalam masyarakat. Konsep kebijakan publik dalam penelitian ini mengacu pada penetapan kebijakan program Kartu Prakerja oleh pemerintah dalam bentuk bantuan kepada masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun lingkup program Kartu Prakerja bersifat nasional, penulis mengacu pada masyarakat di Kota Semarang.

1.6.2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi

kebijakan yang dilakukan sesuai dengan baik akan meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Konsep implementasi kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada implementasi program Kartu Prakerja yang dikeluarkan ditengah masa pandemi COVID-19. Beberapa aspek yang akan diamati seperti sejauh mana keefektifan program tersebut untuk membantu menurunkan tingkat pengangguran di Kota Semarang, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program baik dari sisi penyelenggara maupun penerima bantuan yang berdomisili di Kota Semarang.

1.6.3. Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara keejahteraan memiliki arti bahwa negara menjamin standar kesejahteraan minimum warga negaranya melalui pelayanan sosial yang diberikan. Konsep negara kesejahteraan dalam penelitian ini mengacu pada tingkat efektivitas yang diberikan dalam implementasi Kartu Prakerja di Kota Semarang apakah telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang yang telah menggunakan program Kartu Prakerja tersebut

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang berlangsung dimana peneliti menjadi instrumen utama. Pengambilan sampel data dilakukan

menggunakan teknik purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), penganalisisan data bersifat kualitatif dan hasil yang diperoleh pada penelitian lebih mengedepankan makna dibandingkan generalisasi (Anggito, 2018)

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah wilayah atau tempat dimana penulis akan melaksanakan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi obyek lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, karena merupakan instansi pemerintah yang menjalankan kebijakan Kartu Prakerja di Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada situasi alamiah, dimana tidak dilakukannya manipulasi latar penelitian oleh penulis.

1.7.3. Subjek Penelitian

Adapun subyek penelitian yang dipilih adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, serta masyarakat pengguna Kartu Prakerja yang berdomisili di Kota Semarang.

1.7.4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti merupakan data kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari pengumpulan informasi data ataupun dokumen tertulis yang diperoleh di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan menggunakan sumber data berupa:

7.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan berdasarkan dari kegiatan observasi di lapangan dan wawancara terhadap informan yang dinilai memiliki informasi akurat yang berkaitan dengan program Kartu Prakerja.

7.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang ada dalam penelitian yang didapatkan dari dokumen seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Program Kartu Prakerja. Data sekunder dapat ditemukan pada perpustakaan maupun situs resmi milik instansi yang berhubungan dengan program Kartu Prakerja.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan serta terlibat langsung dalam rangka menggali segala bentuk informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi yang didapat dari hasil observasi dapat berupa tempat, waktu, kegiatan, peristiwa, dan perasaan. Observasi dilakukan penulis untuk mengamati secara detail mengenai implementasi program Kartu Prakerja di Kota Semarang.

2. Wawancara

Proses wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam adalah proses yang dilakukan guna mendapatkan informasi terkait obyek yang diteliti dengan memberikan pertanyaan yang akan dijawab secara langsung oleh informan yang telah ditentukan. Penulis melakukan wawancara secara mendalam dalam rangka menggali informasi baik secara formal maupun informal. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan penulis akan merekam jawaban informan.

3. Studi Literatur

Studi literatur merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti artikel, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan.

1.7.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengolah data yang telah didapatkan dari proses wawancara, observasi dan studi dokumen untuk selanjutnya diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipahami baik orang lain maupun diri sendiri.

Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan penulis, antara lain:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dimana data yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen dikumpulkan untuk selanjutnya di proses ke tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data berarti merangkum, memilah data dan melakukan penyederhanaan dari data kasar yang berasal dari lapangan menjadi terfokus pada hal-hal pokok. Tahap ini dilakukan penulis karena banyaknya data yang diperoleh terutama pada saat wawancara dan observasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai hasil penelitian tersusun.

3. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004). Tahapan ini dilakukan penulis selain untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

4. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. (Rijali, 2019)

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berarti menuliskan hal-hal yang mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Rijali, 2019).